



DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MERESPON KEBIJAKAN RED II

Immara Nuur Alfianisa

Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Indonesia

Email: immaralfns@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima : 28 Juli 2021

Diterima dalam bentuk

revisi : 13 Agustus 2021

Diajukan : 20 Agustus 2021

Kata Kunci:

diplomasi ekonomi;
strategi indonesia; kelapa sawit; RED II; uni eropa.

Abstrak

Lahan Kelapa Sawit yang sangat luas menjadikan Indonesia sebagai pengespor kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2017 kelapa sawit menyumbang devisa kepada Negara sebesar USD 23 Miliar atau setara sekitar Rp 300 Triliun, ekspor pada tahun 2017 naik 26% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 nilai ekspor kelapa sawit mencapai USD 22,97 Miliar atau setara dengan 320,5 Triliun. Pasar ekspor kelapa sawit Indonesia telah menjangkau pada Negara-Negara besar antara lain China, Uni Eropa dan India. Namun, pada tahun 2017 Uni Eropa merilis kebijakan *Delegated Act on Low and High ILUC-Risk Biofuel* dalam *Renewable Energy Directive (RED II)* menggolongkan minyak sawit sebagai *indirect land use change-risk biofuel (ILUC)*. Kebijakan tersebut akan merugikan ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan beberapa strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia antara lain, menghadiri pertemuan nasional maupun internasional seperti menghadiri pertemuan dengan Negara penghasil kelapa sawit, dan *Joint Mission* di Eropa. Mengupayakan lewat WTO, mengupayakan minyak sawit Indonesia bersertifikat berkelanjutan, mengadakan perjanjian dagang dengan Swiss dan kerjasama produksi kelapa sawit dengan Belanda.

Abstract

The vast area of oil palm makes Indonesia the world's largest exporter of palm oil. In 2017 palm oil contributed foreign exchange to the State of USD 23 billion or equivalent to around Rp. 300 trillion, exports in 2017 rose 26% from the previous year. In 2020 the export value of

Keywords:

*economic diplomacy;
indonesian strategy; palm
oil; red ii; european
union.*

palm oil reached USD 22.97 billion or equivalent to 320.5 trillion. Indonesia's palm oil export market has reached major countries including China, the European Union, and India. However, in 2017 the European Union released the Delegated Act on Low and High ILUC-Risk Biofuel in the Renewable Energy Directive (RED II) classifying palm oil as an indirect land use change-risk biofuel (ILUC). This policy will harm Indonesia's palm oil exports to the European Union. This study aims to determine the economic diplomacy strategy carried out by the Government of Indonesia by using qualitative research methods through literature studies. The results of the study show several economic diplomacy strategies carried out by Indonesia, among others, attending national and international meetings such as attending meetings with palm oil-producing countries, and Joint Missions in Europe. Seeking through the WTO, seeking sustainable-certified Indonesian palm oil, entering into a trade agreement with Switzerland, and cooperation in palm oil production with the Netherlands.

Corresponden author: Immara Nuur Alfianisa

Email: immaralfns@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



Pendahuluan

Lahan kelapa sawit yang sangat luas menjadikan Indonesia sebagai pengeskor kelapa sawit terbesar di dunia. Badan Pusat Statistik merilis data pada tahun 2018 hingga tahun 2020 luas areal perkebunan kelapa sawit terus meningkat ([Badan Pusat Statistik \(BPS\), 2020](#)). Tercatat pada tahun 2019 areal perkebunan kelapa sawit adalah 14,6 juta hektare, dengan provinsi Riau yang memiliki areal perkebunan terbesar di Indonesia dengan 2,82 juta hektare pada tahun 2019 atau luasnya sama dengan 19% areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia ([Annur, 2020](#)). Dengan kepemilikan lahan yang besar dan bertambah, wajar apabila Indonesia menjadi Negara pengeskor produk minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2017 kelapa sawit menyumbang devisa kepada Negara sebesar USD 23 Miliar atau setara sekitar Rp 300 Triliun, ekspor pada tahun 2017 naik 26% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016. Ekspor kelapa pada tahun 2020 nilai ekspor kelapa sawit mencapai USD 22,97 Miliar atau setara dengan 320,5 Triliun ([CNV International, 2021](#)). Sektor ekspor kelapa sawit Indonesia membuktikan bahwa tetap bersaing dan unggul dibanding sektor migas dan non migas meski di masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Selain menjadi andalan ekspor Indonesia, kelapa sawit dapat memberikan lapangan pekerjaan yang begitu besar bagi masyarakat, karena luasnya areal perkebunan dan banyaknya

perusahaan sawit di Indonesia maka membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit untuk memproduksi kelapa sawit ini.

Pasar ekspor kelapa sawit Indonesia telah menjangkau pada Negara-Negara besar antara lain China, Uni Eropa dan India. Pada gambar dibawah ini, menunjukkan data bahwa ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa cukup tinggi yaitu sekitar 5,7 juta dan menduduki urutan kedua setelah China. Namun, pada tahun 2017 Uni Eropa merilis kebijakan *Delegated Act on Low and High ILUC-Risk Biofuel* dalam *Renewable Energy Directive* (RED II) menggolongkan minyak sawit sebagai *indirect land use change-risk biofuel* (ILUC). Kebijakan Uni Eropa ini untuk mendukung serta mengurangi konsumsi, impor pada bahan bakar fosil, mengurangi emisi karbon secara global, dan memastikan bioenergi berkelanjutan dalam bentuk komitmen Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto. Protokol Kyoto merupakan kerangka kerja PBB dalam menangani permasalahan perubahan iklim dunia dengan membatasi emisi gas rumah kaca dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Protokol Kyoto diadopsi pada 11 Desember 1997, dan mulai berlaku 16 Februari 2005, dengan beranggotakan 192 Negara yang berkomitmen untuk fokus menangani permasalahan iklim dunia (*United Nations Climate Change*, 2021).

Kelapa sawit telah dikaitkan dengan tingkat deforestasi tertinggi selama periode 2008-2015, 45% dari ekspansi kelapa sawit terjadi di daerah dengan stok karbon tinggi. Parlemen Uni Eropa berupaya menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar transportasi pada tahun 2021. Hal ini berkaitan dengan minyak sawit ini erat dengan tudingan deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, perampasan lahan, sampai dengan pelanggaran HAM terhadap pekerja di sektor Kelapa Sawit ([Parlement](#) , 2017).

Penulis menemukan penelitian yang serupa berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan RED II serta perlindungan terhadap pekerja di sektor kelapa sawit. Faktor Penghambat CPO di Pasar Uni Eropa merupakan penelitian yang dilakukan oleh ([Gaol](#), 2018), hasil dari penelitian tersebut adalah Indonesia menempuh jalur diplomasi kepada Uni Eropa terkait rencana penghentian impor CPO pada tahun 2030, namun dalam upaya tersebut Indonesia mendapatkan hambatan internal dan eksternal. Dalam hambatan internal, sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) tidak diakui oleh Uni Eropa, adanya kegagalan pemerintah dalam melobi APEC untuk memasukan kelapa sawit dalam kategorisasi hutan, kurangnya kerjasama serta sinergi untuk saling mendukung mendapatkan keputusan dalam strategi nasional. Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah adanya kebijakan proteksionisme terhadap industri pemula, pemberian label “*non environmental goods*” yang mengandung CPO pada produk makanan yang beredar di Eropa, desakan kepada negara Uni Eropa untuk memberlakukan *Renewable Energy Directive* (RED), paradoks kebijakan Uni Eropa yang mengunggulkan kapabilitas perkebunan minyak nabati lokal dibanding lahan pertanian lainnya dalam menyerap gas emisi karbon, dan joint campaign negara produsen CPO.

Dari penelitian pertama menunjukkan bahwa Indonesia merespon kebijakan Uni Eropa dengan upaya diplomasi, namun dalam prakteknya masih tersandung banyak faktor penghambat baik faktor internal maupun faktor eksternal. Penulis melakukan

penelitian diplomasi ekonomi Indonesia dalam merespon kebijakan *renewable energy directive* II. Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan penulis, namun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada diplomasi ekonomi Indonesia sebagai upaya merespon kebijakan RED II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon dari Pemerintah Indonesia melalui upaya diplomasi ekonomi dalam menyikapi kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive* II) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa yang telah melakukan diskriminasi dan hambatan dagang kepada Indonesia. Diplomasi ekonomi merupakan cara terbaik Indonesia untuk bernegosiasi dengan Uni Eropa, keputusan Uni Eropa ini telah memberi stigma negatif pada industri kelapa sawit Indonesia di pasar global, kelapa sawit Indonesia tidak tergolong pada minyak nabati berkelanjutan, lekat dengan isu deforestasi sampai dengan pelanggaran HAM. Untuk menciptakan kelapa sawit yang berkelanjutan dibutuhkan adanya pembuktian dengan sertifikasi, selain itu terjaminya kondisi sosial para pekerja menjadi penentu dari syarat kelapa sawit berkelanjutan.

Upaya Indonesia untuk menciptakan kelapa sawit berkelanjutan diwujudkan dengan adanya Instruksi Presiden. Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 November 2019 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024 ([BPDP](#), 2019a). Tujuan disahkannya Inpres ini untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari pekebun, untuk menyelesaikan kasus legislasi lahan perkebunan, memanfaatkan kelapa sawit sebagai energi terbarukan serta meningkatkan diplomasi untuk menciptakan dan mempercepat perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang berkelanjutan. Tujuan tersebut diselaraskan dengan misi yang akan dilakukan diantaranya, dengan penguatan data dan penguatan koordinasi dan infrastruktur, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, pengelolaan dan penanganan lingkungan, menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, mendukung sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan kepemilikan sertifikat *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO).

Upaya menciptakan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan sudah ditetapkan oleh Presiden, selain itu adanya sertifikasi ISPO sebagai pembuktian minyak kelapa sawit Indonesia sudah sesuai dengan standar berkelanjutan. Langkah Indonesia selanjutnya adalah dengan upaya diplomasi ekonomi, cara ini dilakukan dengan upaya negosiasi, serta kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam merespon RED II ini Pemerintah Indonesia perlu melakukan edukasi, dan promosi tentang kelapa sawit Indonesia ke pasar global agar tercipta narasi yang baik dan positif. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan citra positif sawit Indonesia, keberlangsungan ekspor, dan meningkatkan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori Liberalisme, teori ini berpendapat bahwa setiap orang dan seluruh negara akan memperoleh keuntungan antar negara dari berkembangnya pasar bebas (*free market*) dan pertukaran gagasan yang terbuka (Umar Suryadi Bakry, 2017). Penulis juga menggunakan konsep diplomasi ekonomi dalam penelitian ini. Bentuk diplomasi ekonomi salah satunya adalah dengan adanya kebijakan kerjasama antar negara, serta melakukan promosi terhadap komoditas atau produk kepada negara lain. Teori dan konsep ini meyakini bahwa *free market* dapat

menguntungkan ekonomi dari negara pelakunya serta akan mendapatkan manfaat dan keuntungan khususnya dalam bidang ekonomi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analisis. Tipe penelitian deskriptif analisis menurut ([Sugiyono, 2016](#)) merupakan tipe yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mendalam mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Tipe penelitian deskriptif analisis digunakan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mendeskripsikan, dan menganalisis tentang upaya dari diplomasi ekonomi Indonesia dalam merespon RED II. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dan relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Diplomasi Ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa Merespon RED II

Dalam menganalisis penelitian ini maka penulis menggunakan konsep diplomasi ekonomi untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan RED II yang dikeluarkan Uni Eropa melalui strategi diplomasi ekonomi. Diplomasi menurut ([Satow, 2011](#)) ialah penerapan yang berasal dari kecerdasan serta kebijaksanaan kegiatan atau hubungan resmi yang dijalin oleh antar pemerintah dari suatu negara dengan negara lain yang berdaulat, terkadang bisa juga dilakukan oleh negara berdaulat dengan negara vassal. Negara vassal merupakan Negara yang berdaulat namun tunduk terhadap Negara lain yang merupakan Negara induknya ([Serikatnews, 2018](#)). Dengan kata lain diplomasi dilakukan dengan mempengaruhi suatu keputusan atau pandangan pihak lain melalui negosiasi atau cara lain dengan menghindari tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan. ([Arystankulova, 2018](#)) berasumsi bahwa diplomasi ekonomi berkaitan dengan bagaimana suatu negara membuat dan mengambil keputusan dengan penggunaan instrument ekonomi untuk mewujudkan kepentingan ekonomi melalui penyebaran dampak terhadap situasional maupun kebijakan ekonomi yang ada di negara lain maupun organisasi internasional tertentu. Dalam pernyataan Presiden Joko Widodo (2020) bahwa Duta Besar perwakilan Indonesia di luar negeri mendapatkan tugas baru yakni melakukan diplomasi ekonomi, dengan titik berat focus 70%-80% kegiatan diplomasi diarahkan menuju diplomasi ekonomi. Prioritas politik luar negeri Indonesia pada tahun 2021 konsen kepada 5 hal, penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, meningkatkan kontribusi, dan

kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, dan penguatan infrastruktur diplomasi. Dan menangani diskriminasi pada industri minyak kelapa sawit Indonesia menjadi bagian dalam fokus diplomasi ekonomi.

Hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa sudah terjalin sejak tahun 1967 di bawah kerangka ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), hal ini membuktikan sampai dengan hari ini kedua negara masih menjalin hubungan yang baik, terutama dalam bidang perdagangan. Indonesia sebagai pengeksportor kelapa sawit terbesar di dunia mendapatkan keuntungan dari ekspor kelapa sawit ini, khususnya ekspor ke Uni Eropa. Namun pada tanggal 4 April 2017 Parlemen Uni Eropa mengeluarkan Resolusi Sawit yang tertuang dalam *Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Renewable Energy Directive II (RED II)* dan *Delegated Regulation* yang disahkan di Strasbourg. *Delegated Regulation (DR ILUC)* sebagai aturan pelaksana RED II telah diadopsi oleh Komisi Uni Eropa pada tanggal 13 Maret 2019 dan telah berlaku pada tanggal 10 Juni 2019. Uni Eropa menganggap bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang tidak berkelanjutan. Sehingga Parlemen Uni Eropa berupaya mengurangi konsumsi minyak kelapa sawit sebagai bahan biofuel pada 2024 dan menghentikan secara total pemakaian minyak kelapa sawit pada 2030 (The [Jakarta Post](#), 2021). RED merupakan *directive* yang sifatnya adalah mengikat, maka Negara anggota Uni Eropa wajib mentaati peraturan tersebut. Indonesia sebagai Negara produsen minyak kelapa sawit merespon kebijakan Uni Eropa melalui beberapa upaya, diantaranya adalah dengan diplomasi ekonomi untuk mematahkan pandangan negatif tentang minyak kelapa sawit Indonesia. Diplomasi penting dilakukan untuk membangun pemahaman, pengetahuan tentang minyak kelapa sawit, dan juga mempromosikan minyak sawit Indonesia ke pasar-pasar global yang berpotensi.

Duta Besar Indonesia untuk Uni Eropa, Ariv Havas mengatakan bahwa masyarakat Indonesia perlu melakukan penelitian dan promosi lebih jauh terhadap komoditas minyak kelapa sawit dikancah nasional maupun global. Pemahaman tentang kelapa sawit yang baik akan membawa kepada narasi positif, dan tidak sesuai apa yang ada didalam RED II yang cenderung menggiring kepada kampanye hitam. Kebijakan Uni Eropa ini mendiskriminasi produk sawit, dan cenderung seperti upaya proteksionisme ([Sally](#), 2016). ([Widodo](#), 2011) memaparkan dalam jurnalnya bahwa ketika Indonesia ingin meningkatkan diplomasi ekonominya maka dibutuhkan sinergi dan strategi antara pemangku kepentingan. Salah satu upaya dari Badan Pengkaji dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Indonesia adalah dengan lebih fokus pada pengembangan kerjasama dengan para akademisi, peneliti, lembaga dan institusi terkait baik dalam maupun luar negeri agar menciptakan kebijakan kelapa sawit yang berkelanjutan. BPPK melakukan Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) pada Juli 2017, dari hasil kajian forum ini dapat disimpulkan beberapa isu kampanye hitam yang dilakukan Amerika dan Eropa adalah tentang deforestasi, lingkungan hidup, kesehatan, dan HAM pada pekerja anak dan perempuan. Kementerian Luar Negeri juga bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam memberikan pembekalan kepada para diplomat mengenai komoditas ekspor

utama Indonesia, yaitu minyak kelapa sawit. Sebanyak 25 diplomat Indonesia pada tanggal 11 Mei 2018 mendapat pembekalan pengetahuan tentang kelapa sawit secara langsung di perkebunan sawit swasta milik Asian Agri di Riau (BPDP, 2018). Kegiatan ini adalah bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan diplomasi ekonominya khususnya pada sektor industri kelapa sawit, diharapkan para diplomat nantinya akan piawai dalam mempromosikan produk kelapa sawit di Indonesia di kepada negara lain, sehingga ekspor Indonesia semakin meningkat dan berpengaruh baik terhadap peningkatan ekonomi bangsa. Melalui adanya forum dan kerjasama ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan minyak kelapa sawit di Indonesia dapat merumuskan strategi apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan diplomasi ekonomi untuk merespon kebijakan RED II Uni Eropa, strategi yang dilakukan Pemerintah Indonesia antara lain dengan: Diplomasi Sawit, Menghadiri Pertemuan *The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries*, Diplomasi *Joint Mission* Sawit ke Uni Eropa, Upaya Indonesia Melalui WTO, Memberlakukan Sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO), Melakukan Perjanjian Dagang Minyak Kelapa Sawit Indonesia dengan Swiss, dan Kerja Sama Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan Belanda.

Diplomasi Sawit

Seiring dengan bertambahnya jumlah populasi di dunia, maka permintaan terhadap minyak nabati akan selalu meningkat, khususnya pada minyak kelapa sawit. Indonesia sebagai negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, melihat adanya keuntungan dan tantangan pada komoditas kelapa sawit dimasa akan datang. Dalam nilai strategisnya minyak kelapa sawit merupakan sebagai bahan utama dari pembuatan makanan, kosmetik, sabun dan *renewable energy* lainnya, selain itu minyak kelapa sawit merupakan industri paling efisien jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya dilihat dari sisi penggunaan lahan dan hasil panen. Selain itu keberlanjutan kelapa sawit Indonesia merupakan upaya untuk mencapai tujuan SDGs pada UN Agenda 2030, dalam menghapus kemiskinan, menciptakan ketahanan pangan, dan lapangan pekerjaan. Bahkan dimasa pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia masih mengungguli komoditas lainnya, sehingga menjadi sumber devisa unggulan Negara Indonesia. Dalam keberlangsungan diplomasi sawit ini mendapatkan tantangan, diantaranya adalah pada tuntutan minyak kelapa sawit berkelanjutan (*sustainability*), muncul kampanye hitam yang membuat stigma negatif pada industri minyak kelapa sawit Indonesia, dan tantangan dimasa pandemi ini membawa kepada ketidakstabilan kondisi harga ekonomi global. Sehingga strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan diplomasi sawit adalah dengan melakukan peningkatan promosi dan *marketing intelligence*, menjaga daya saing komoditas, meningkatkan keberterimaan ISPO di pasar global dan mengatasi hambatan perdagangan di negara akreditasi. Optimalisasi keanggotaan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional. *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC), FAO, WTO, dan ASEAN. Dan sinergi kerjasama dengan para pemangku kepentingan (Sawit, 2021).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bertolak ke Roma, Eropa pada 15 Mei 2018 untuk menghadiri acara konferensi internasional tentang pengentasan kemiskinan di Pontifical Urban University Vatikan di Roma, Italia. Luhut Binsar Panjaitan berupaya melobi Uni Eropa agar mempertimbangkan kebijakannya tersebut, serta memaparkan bahwa faktanya industri kelapa sawit Indonesia berperan penting dalam ekonomi nasional, dan juga menjadi tempat lapangan pekerjaan (Oke [Finance](#), 2018). Diskusi dengan para pemangku kepentingan kelapa sawit pun dilakukan di Brussel, juga dengan anggota Parlemen Uni Eropa, Pejabat Komisi Uni Eropa, Duta Besar Uni Eropa. Dalam kesempatan ini Luhut Binsar Panjaitan melakukan diplomasi sawit, menegaskan bahwa produksi kelapa sawit Indonesia dilakukan secara berkelanjutan, dengan mementingkan kondisi lingkungan. Kelapa sawit Indonesia merupakan tempat bergantungnya Indonesia terutama dalam menuntaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kunjungan Luhut tersebut dilanjutkan ke beberapa negara di Eropa lainnya, seperti Vatikan, Belanda, dan Jerman ([Republika.co.id](#), 2018). Hasil dari upaya diplomasi sawit tersebut setidaknya Indonesia mendapat kelonggaran, karena larangan penggunaan minyak sawit diundur sampai dengan tahun 2030 ([Merdeka.com](#), 2018). Sehingga Indonesia masih bisa meningkatkan lagi kualitas minyak kelapa sawitnya dengan waktu yang cukup panjang.

The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries

Pada tanggal 17-18 November 2019 negara-negara penghasil kelapa sawit yang tergabung dalam *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) melakukan pertemuan *The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries* (MMPOPC) di Kuala Lumpur, Malaysia ([BPDP](#), 2019b). Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dalam kesempatan tersebut disepakati beberapa hal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas harga untuk petani dan rakyat, melaksanakan promosi terhadap produk sawit ke pasar global, berkomitmen membawa komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan, mengundang negara produsen minyak kelapa sawit untuk bergabung dalam CPOPC, dan meningkatkan kesejahteraan pada perkebunan rakyat. Pembekalan pengetahuan mendalam dan melakukan promosi terhadap industri kelapa sawit sangat dibutuhkan untuk menepis stigma negatif yang dilontarkan oleh Uni Eropa. Dalam upaya diplomasi ekonominya juga, Indonesia giat dalam memperjuangkan industri kelapa sawit dengan menghadiri beberapa pertemuan bersama para negara produsen kelapa sawit, dan juga pihak Uni Eropa. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan solidaritas dari para negara produsen dan menjalin kerjasama dari perwakilan Indonesia yang berada di luar negeri untuk membangun narasi tentang citra kelapa sawit Indonesia, dan mengoptimalkan kolaborasi riset antarlembaga di Indonesia serta mitra Kawasan Amerika dan Eropa.

Diplomasi Joint Mission Sawit ke Uni Eropa

Kebijakan yang dirilis Uni Eropa yang cenderung diskriminasi terhadap komoditas minyak kelapa sawit ini membawa Indonesia, Malaysia, dan Kolombia

melakukan *joint mission* ke Brussel dan Belgia pada tanggal 8-9 April 2019 ([BPDP, 2019c](#)). Langkah ini sebagai bentuk upaya diplomasi ke Uni Eropa. Diplomasi ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan industri serta perlindungan kepada para petani kelapa sawit atas diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit. Dari hasil pertemuan ini memberikan kesimpulan bahwa, pertama adanya gap terhadap pemahaman produk minyak kelapa sawit serta kebijakan pengembangannya. Kedua, kampanye hitam tentang produk minyak kelapa sawit sangat tinggi di Kawasan Uni Eropa. Ketiga, adanya kompetisi perdagangan antara minyak kelapa sawit dengan *rapeseed oil*, dan *sunflower oil*. Selain itu Uni Eropa akan mengadakan diskusi lanjutan dengan negara-negara produsen minyak kelapa sawit, para pemangku kepentingan minyak kelapa sawit di Uni Eropa mewadahi untuk melakukan komunikasi terkait kampanye hitam yang ada. Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dari perusahaan multinasional (MNCs) dalam merespon kebijakan diskriminatif Uni Eropa ini. Dalam pertemuan ini dapat dilihat bahwa Uni Eropa hanya sepihak dalam membuat kebijakan yang memberatkan komoditas minyak kelapa sawit, memberikan asumsi bahwa produksi dari minyak kelapa sawit penyumbang besar dari kerusakan lingkungan. Faktanya adalah minyak kelapa sawit memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi dan penggunaan lahan yang jauh lebih kecil dibandingkan minyak nabati lainnya terutama minyak yang dihasilkan dari Uni Eropa. Pemerintah Indonesia menyampaikan apabila RED II ini tetap dilaksanakan, maka Pemerintah Indonesia akan mereview kerjasama bilateral dengan Uni Eropa dan anggota negaranya, dan akan membawa isu ini ke WTO (*World Trade Organization*).

Upaya Indonesia Melalui WTO

WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki aturan global dalam mengatur perdagangan antar negara, memastikan bahwa perdagangan berjalan dengan baik, bisa diprediksi dan perdagangan dilakukan dengan sebebaskan mungkin sehingga membuka perdagangan untuk kepentingan semua ([WTO, 2021](#)). Tindakan diskriminasi Uni Eropa ini tidak sesuai dengan prinsip dari WTO untuk memudahkan melakukan perdagangan bebas antar negara, namun Uni Eropa justru mendiskriminasi dan berupaya menutup pintu ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan keberatan atas kebijakan Uni Eropa di berbagai forum bilateral, baik dalam *Working Group on Trade and Investment Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) dan pertemuan *Technical Barriers to Trade Committee* di WTO.

Selain membahas tentang diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit, Wakil tetap RI di Jenewa Duta Besar Hasan Kleib meminta kepada Uni Eropa untuk menghentikan kebijakan pelabelan “bebas-minyak-sawit” (*palm oil free labelling*) pada berbagai produk konsumen yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan swasta di Uni Eropa ([Permanent Mission of The Republic of Indonesia, 2018](#)). Indonesia telah resmi mengajukan *Request for Consultation* pada 9 Desember 2019 kepada Uni Eropa sebagai awal inisiasi dalam gugatan, Pemerintah Indonesia berharap Uni Eropa merubah

kebijakan RED II dan *Delegated Regulation* (VOA, 2019). Sempat ditolak pada pertemuan *Dispute Settlement Body* (DSB) pada 29 Juni 2020, akhirnya permohonan Indonesia terkait kebijakan biofuel Uni Eropa pada (sengketa DS 593) ini dikabulkan pada 29 Juli 2020 setelah Indonesia mengajukan pada permohonan kedua. Terdapat 18 Negara yang menyatakan bersedia menggunakan hak untuk ikut berpartisipasi dalam proses ini, Amerika Serikat, Malaysia, Norwegia, Turki, Singapura, Thailand, Rusia, Jepang, Korea, India, Honduras, Guatemala, Kosta Rika, Kolombia, China, Kanada, Brasil dan Argentina.

Dalam rapat persiapan sidang pertama (*first substantive meeting*) pada 06 April 2021. Rapat ini dilaksanakan secara *hybrid* mengingat dalam masa pandemi, dipimpin oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan dibuka oleh Wakil Menteri Perdagangan RI. Dalam rapat ini, Wakil Menteri Perdagangan menekankan bahwa Indonesia tetap berkomitmen dalam menerapkan kelapa sawit berkelanjutan, mengingat adanya kerjasama Indonesia dengan Swiss dalam ekspor minyak kelapa sawit (Direktoret Jenderal Perdagangan Luar Negeri, 2021). Indonesia dalam WTO berupaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya, karena Uni Eropa sudah menutup pasar bebas dan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit Indonesia tanpa dasar ilmiah. Dan Uni Eropa telah melanggar prinsip "*free and trade*" dalam WTO. Selain itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyatakan bahwa langkah kedepan dalam promosi sawit tidak hanya dilakukan secara defensif namun juga akan ofensif (BPDP, 2021).

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)

Adanya isu kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial menjadi salah satu alasan yang mendorong pembentukan sertifikasi sawit global *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) (Von Geibler, 2013). Untuk mendapatkan minyak sawit yang bersertifikat berkelanjutan yaitu *Certified Sustainable Palm Oil* (CSPO), maka para pemangku kepentingan harus menerapkan kriteria yang telah ditetapkan oleh RSPO. RSPO dibentuk pada tahun 2004 untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk minyak sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lembaga RSPO telah mencatat lahan perkebunan kelapa sawit di Riau yang memiliki sertifikat RSPO sejak Agustus 2020 tercatat sekitar 416.860 hektare. Terdapat 13 grup perusahaan yang sudah memegang sertifikat RSPO dan 43 pabrik kelapa sawit bersertifikat yang sama, jika ditotal seluruh Indonesia pekebun swadaya atau plasma terbanyak di dunia yang sudah bersertifikat dengan jumlah 5.130 orang.

Sejak tahun 2011 Indonesia pun telah memiliki sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yaitu *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Kebijakan ini diadopsi oleh Kementerian Pertanian mewakili Pemerintah Indonesia dengan tujuan serta meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di ranah pasar global, juga berkontribusi pada tujuan Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas dan memberlakukan minyak sawit berkelanjutan (RSPO, 2016). Meskipun Indonesia telah

memberlakukan sistem sertifikasi ISPO, tetapi minyak kelapa sawit Indonesia tidak serta merta terlepas dari adanya tuntutan *Sustainable Palm Oil*, tuntutan yang dilayangkan oleh konsumen, industri produk berbahan standar minyak kelapa sawit, dan tidak jarang pula dari lembaga non pemerintahan, baik di taraf nasional, regional ataupun internasional. Dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO masih terdapat hambatan dan kelemahan seperti, proses mekanisme pemberian sertifikasi yang tidak transparan, tidak ada kekuatan untuk mempengaruhi pasar dan konsumennya karena dianggap sebagai kebijakan lokal, dan masalah tentang tidak diterimanya sertifikasi ini dikarenakan lekatnya stigma negatif sektor kelapa sawit di Indonesia. Untuk menjawab masalah tentang sertifikasi ISPO serta meningkatkan pengelolaan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, maka pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, dan diundang-undangkan pada tanggal 16 Maret 2020.

ISPO secara objektif menelaah CPO dari berbagai aspek SDGs, termasuk aspek pengurangan tingkat kemiskinan serta mengatasi ketimpangan dan ketidaksetaraan, sehingga sesuai dengan pemenuhan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa yang menggolongkan minyak sawit sebagai *high risk-ILUC biofuel*, Indonesia harus selalu meningkatkan kualitas sertifikasinya. Peningkatan kualitas ISPO ini bertujuan agar *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Renewable Energy Directive* (RED) tidak menjadi hambatan signifikan bagi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke pasar Eropa. Selain itu juga perlu diingat bahwa produsen besar minyak kelapa sawit selain Indonesia adalah Malaysia ([Widyaningtyas & Widodo, 2017](#)). Tidak aneh lagi rasanya jika Indonesia dan Malaysia selalu berkompetisi, namun dalam aspek ketersediaan lahan perkebunan, Indonesia memiliki lahan yang lebih luas, sehingga mampu memperoleh produksi lebih banyak dan dibarengi oleh hasil produksi yang bersertifikasi sesuai SDGs.

Perjanjian Dagang Minyak Kelapa Sawit Indonesia dengan Swiss

Referendum Swiss menyetujui untuk melakukan perdagangan bebas dengan Indonesia pada produk minyak kelapa sawit dengan perolehan suara dari sebanyak 51% pada tanggal 07 Maret 2021. Untuk impor produk minyak sawit, bea cukai Swiss tidak akan menghapus namun akan mengurangi antara 20%-40% dengan volume yang dibatasi hingga 12.500 ton per tahun. Perjanjian ini telah meningkatkan hubungan bilateral antara Swiss dan Indonesia, dengan adanya poster beruang Swiss tengah memeluk harimau sebagai simbol satwa Indonesia. Perjanjian perdagangan ini akan menguntungkan juga bagi Swiss karena akan membuka pasar baru yang menjanjikan bagi negaranya. Selain itu Swiss juga menekankan bahwa setiap impor minyak kelapa sawit Indonesia yang masuk harus memiliki bukti standar lingkungan dan sosial tertentu ([VOA, 2019](#)).

Kerja Sama Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan Belanda

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi melakukan perjalanan dinas ke Belanda untuk meningkatkan kerjasama bilateral. Belanda merupakan negara importir minyak kelapa sawit terbesar di Uni Eropa, sekitar 15% ekspor Indonesia adalah ke Belanda. Indonesia dan Belanda bekerjasama untuk meningkatkan *sustainability* kelapa sawit dengan kerjasama produksi kelapa sawit berkelanjutan. Program senilai EUR 5 juta ini dilaksanakan selama 5 tahun sejak 2019-2023, dan memberikan program-program produksi kelapa sawit berkelanjutan bagi petani-petani di Sumatra dan Kalimantan, termasuk dukungan terhadap petani kecil untuk memenuhi sertifikasi ISPO. Kerja sama akan diperluas mencakup juga minyak nabati lainnya dalam konteks kontribusi terhadap SDGs 2030 (BPDP, 2021).

Kesimpulan

Ketersediaan lahan perkebunan kelapa sawit yang besar dan efektifitas hasil panen membawa Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Bahkan dimasa pandemi saat ini ekspor kelapa sawit Indonesia masih menjanjikan. Namun dengan adanya kebijakan RED II yang dikeluarkan Uni Eropa cenderung mendeskriminasikan industri kelapa sawit Indonesia, sehingga menimbulkan stigma negatif yang akan berpengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia. Salah satu konsen prioritas politik luar negeri Indonesia pada tahun 2021 adalah dengan diplomasi ekonomi, yang didalamnya memfokuskan untuk menghentikan isu diskriminasi pada kelapa sawit Indonesia. Sehingga langkah yang tepat dalam merespon kebijakan RED II oleh Indonesia adalah dengan melakukan upaya diplomasi ekonomi. Indonesia giat dalam menghadiri pertemuan nasional maupun internasional dalam memperjuangkan penuh hak kelapa sawit Indonesia, seperti menghadiri pertemuan dengan Negara penghasil kelapa sawit, dan *Joint Mission* di Eropa. Diplomasi sawit yang dilakukan Indonesia pada Uni Eropa membuahkan hasil, setidaknya Uni Eropa menunda larangan impor minyak kelapa sawit Indonesia sampai dengan 2030. Kebijakan Uni Eropa yang menutup impor kelapa sawit dari Indonesia pun bertolak belakang dengan prinsip perdagangan bebas, sehingga Indonesia membawa isu ini ke WTO, namun sampai saat ini belum ada titik terang. Indonesia telah menerapkan standar sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan yang dikenal dengan ISPO, hal ini pun sebagai komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs pada UN Agenda 2030 untuk menciptakan kelapa sawit berkelanjutan. Meski Indonesia dan Uni Eropa sedang bersitegang atas dilarangnya penggunaan minyak kelapa sawit, namun Indonesia bisa meyakinkan beberapa Negara di Eropa melalui diplomasinya yang menghasilkan beberapa kerjasama bilateral. Hasil dari referendum Swiss menyatakan menerima perdagangan bebas dengan Indonesia pada impor minyak kelapa sawit berkelanjutan. Sementara itu, untuk mendukung produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan Indonesia bekerjasama dengan Belanda. Keberhasilan dari diplomasi ekonomi memerlukan sinergi dan kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan, upaya edukasi dan promosi merupakan hal penting untuk membangun narasi positif pada industri kelapa sawit Indonesia di pasar global.

Sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi Indonesia, yang menciptakan pembangunan bangsa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Annur, C. M. (2020). *Luas Areal Perkebunan Sawit di Indonesia Capai 14,60 Juta Hektare*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/30/luas-areal-perkebunan-sawit-di-indonesia-capai-1460-juta-hektare>
- Arystankulova, G. (2018). [Economic Diplomacy-Important Component Of Foreign Policy Of Modern State](#). *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication* September, 2864–2873.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Statistik Indonesia Tahun 2010*. Badan Pusat Statistik: Jakarta Pusat.
- BPDP. (2018). *Diplomat Indonesia Peroleh Pembekalan Sawit*. <https://www.bpdp.or.id/Diplomat-Indonesia-Peroleh-Pembekalan-Sawit>.
- BPDP. (2019a). *Hasil Diplomasi Joint Mission Sawit ke Uni Eropa*. <https://www.bpdp.or.id/Hasil-Diplomasi-Joint-Mission-Sawit-ke-Uni-Eropa>.
- BPDP. (2019b). *Inpres Rencana Aksi Nasional Sawit Berkelanjutan 2019-2024*. <http://www.bpdp.or.id/inpres-rencana-aksi-nasional-sawit-berkelanjutan-2019-2024>.
- BPDP. (2019c). *Kesepakatan Pertemuan Tingkat Menteri Negara Produsen Sawit ke-2*. <https://www.bpdp.or.id/Kesepakatan-Pertemuan-Tingkat-Menteri-Negara-Produsen-Sawit-ke-2>.
- CNV International. (2021). *Protecting The Rights of Women in Palm Oil Plantations*. <https://www.cnvinternationaal.nl/en/our-work/news/2021/march/guide-labour-rights-women-palmoil-Indonesia>.
- Gaol, D. F. (2018). Faktor Penghambat Diplomasi CPO Indonesia di Pasar Eropa. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(2), 38–50. DOI: <https://doi.org/10.32787/ijir.v2i2.47>
- Merdeka.com. (2018). *Menko Luhut bangga diplomasi kelapa sawit RI di Uni Eropa Mulai Membuahkan Hasil*. <https://www.merdeka.com/uang/menko-luhut-bangga-diplomasi-kelapa-sawit-ri-di-uni-eropa-mulai-membuahkan-hasil.html>.
- Oke Finance. (2018). *Di Roma, Menko Luhut Beberkan Kelapa Sawit Efektif Kurangi Kemiskinan*. <https://economy.okezone.com/read/2018/05/17/320/1899314/di-roma-menko-luhut-beberkan-kelapa-sawit-efektif-kurangi-kemiskinan>.
- Parlement, E. (2017). *Palm Oil and Deforestation of Rainforests*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0098>.
- Permanent Mission of The Republic of Indonesia. (2018). *Indonesia di WTO: Perjuangan Akses Pasar Uni Eropa bagi Ekspor Kelapa Sawit*. <https://mission->

indonesia.org/2018/11/16/indonesia-di-wto-perjuangkan-akses-pasar-uni-eropa-bagi-ekspor-kelapa-sawit/.

Republika.co.id. (2018). *Indonesia promotes its palm oil diplomacy to EU*. <https://www.republika.co.id/berita/en/national-politics/18/04/26/p7so33414-indonesia-promotes-its-palm-oil-diplomacy-to-eu>.

RSPO. (2016). *Studi Bersama ISPO-RSPO Sebuah Pencapaian Penting dalam Kerjasama Mewujudkan Minyak Sawit Berkelanjutan di Indonesia*. <https://rspo.org/news-and-events/news/studi-bersama-isporspo-sebuah-pencapaian-penting-dalam-kerjasama-mewujudkan-minyak-sawit-berkelanjutan-di-indonesia>.

Sally, N. U. (2016). Sengketa Minyak Sawit Antara Indonesia dan Uni Eropa. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 1(01).DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/dauliyah.v1i01.341>

Satow, E. M. (2011). *A guide to diplomatic practice (Vol. 2)*. Longmans, Green and Company.

Sawit, I. (2021). *Hadapi Diskriminasi Minyak Sawit, Masuk Dalam Lima Prioritas Diplomasi Kemenlu*. <https://www.infosawit.com/news/11011/hadapi-diskriminasi-minyak-sawit--masuk-dalam-lima-prioritas-diplomasi-kemenlu>.

Sugiyono, P. D. (2016). metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta, cv*.

The Jakarta Post. (2021). *Analysis: Palm oil and coconut: Strategy to face EU's RED II Proposal*. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/27/analysis-palm-oil-and-coconut-strategy-face-eu-s-red-ii-proposal.html>.

VOA. (2019). *Indonesia Gugat Uni Eropa di WTO Terkait Kebijakan Kelapa Sawit*. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto-terkait-kebijakan-kelapa-sawit/5207299.html>

Von Geibler, J. (2013). Market-based governance for sustainability in value chains: conditions for successful standard setting in the palm oil sector. *Journal of Cleaner Production*, 56, 39–53. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.08.027>

Widodo, S. (2011). Implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme. *Jurnal Ilmiah Civis*.DOI: <https://doi.org/10.26877/civis.v1i1/Januari.572>

Widyaningtyas, D., & Widodo, T. (2017). Analisis pangsa pasar dan daya saing CPO Indonesia di Uni Eropa. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 18(2), 138–145. DOI: <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v18i2.4510>

WTO. (2021). *About WTO*. https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm.